

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH ANAK DI LUAR  
NIKAH YANG TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA**

(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**ERVIANA**

**NPM: 1621010089**

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH ANAK DI LUAR  
NIKAH YANG TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA**

(Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong  
Kabupaten Lampung Barat)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi**

**Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**ERVIANA**

**NPM: 1621010089**

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyyah)**



**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A**

**Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/ 2020 M**

## ABSTRAK

Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat, terdapat orang yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya yaitu dengan cara menisbahkan nasab anak di luar nikah kepada orang lain atau saudaranya yang ada di luar kota dan berakibat memutuskan hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ibu kandungnya berdasarkan proses kehamilan dan kelahirannya. Islam menganjurkan umatnya untuk menikah dan melarang perbuatan zina serta adopsi secara mutlak yang berimbas mengacaukan, mengingkari, memutuskan hubungan nasab sehingga tidak terjaga kemurnian nasabnya. Rumusan masalah dari penelitian ini bagaimana faktor terjadinya nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya dan bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai nisbah tersebut.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Penelitian ini berjenis lapangan (*Field Research*) dan bersifat deskriptif analitik, berdasarkan jenis sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dan data sekunder yang mendukung sumber data resmi.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*). Adapun untuk pengelolaan data adalah induktif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menarik dari fakta khusus kemudian menjadi umum, analisis data adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya berasal dari faktor sebagai berikut: Tidak mendapat pertanggung jawaban, karena malu hamil dan melahirkan tanpa adanya suami, untuk menutup aib keluarga, merasa iba karena anak di luar nikah ditelantarkan oleh ibu kandungnya sendiri, untuk mempermudah pelayanan administrasi anak, mengikuti orang yang lebih dulu melakukan nisbah anak di luar nikah dengan dalih memiliki kesamaan nasib.

Tinjauan hukum Islam anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya hukumnya adalah haram. Hal ini dikarenakan nasab merupakan karunia besar yang Allah turunkan dan diperintahkan kepada umat-Nya untuk menjaga keturunannya, jangan sampai dipalsukan, apalagi didustakan.

## SURAT PERNYATAAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erviana  
NPM : 1621010089  
Jurusan/Prodi : al-Ahwal al-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH ANAK DI LUAR NIKAH YANG TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)". Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan saya sendiri, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foodnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepeuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,  
Penulis,



**ERVIANA**  
NPM: 1621010089





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukaramé Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH ANAK  
DI LUAR NIKAH YANG TIDAK PADA IBU**  
**KANDUNGNYA** (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan  
Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)

Nama : **Erviana**  
NPM : **162101089**  
Jurusan : **Hukum Keluarga Islam**  
Fakultas : **Syariah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah  
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Iskandar Syukur, M.A.**  
**NIP: 196603301992031002**

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag. M.Si**  
**NIP: 197304144200002002**

Ketua Jurusan,

**H. Rohmat, S.Ag. M.H.I**  
**NIP: 1974092020031221003**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya** (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat). Disusun oleh: **Erviana, NPM: 1621010089, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jum'at, 26 Juni 2020.

**TIM MUNAQOSYAH**

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Muhammad Jayus, M.H.I

Penguji Utama : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Penguji Pendamping I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.

Penguji Pendamping II : Yufi Wiyos Rini M. S.Ag, Msi

Mengetahui,  
**Dekan Fakultas Syariah**



**H. H. Khairuddin, M.H**  
**NIP. 196210251993031002**



## MOTTO

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رُثُكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu

(punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

(Q.S Al-Furqan: (25) ayat (54).



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahil'alamin*, segala puji bagi Allah SWT yang Maha segalanya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang selalu kita nantikan syafa'atnya di yaumul kiamah kelak.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, sayang dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Ayahandaku Zainal Arifin dan Ibundaku Sumiyati, yang tiada henti-hentinya selalu memberikan semangat, mendukung, membimbing, dan mendoakan segala kegiatan dan aktivitasku, agar dapat mewujudkan dan mencapai puncak prestasi terbaik. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta dipanjangkan umur ketaatannya sehingga anakmu bisa sedikit membalas jerih payah ayah dan ibu.
2. Kepada kakak-kakakku, (Almh. Atik Sushanti) yang telah mengajarkanku pentingnya pendidikan dan melanjutkan sampai kejenjang sarjana, semoga kakak ditempatkan di tempat yang paling mulia disurga-Nya. Dan Tri Makno Rahayu yang selalu menasihati dan membimbing, dan meneguhkan keyakinan ku dikala aku putus asa.
3. Terakhir kepada Almamater Tercinta, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang berjasa, karena telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu, serta memberikan jalan untuk meraih cita-cita.



## **RIWAYAT HIDUP**

Erviana adalah nama penulis Skripsi ini. Yang lahir di Pekon Air Hitam, Kecamatan Air Hitam Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 18 Desember 1998, putri kedua pasangan dari Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Sumiyati. Penulis mengawali pendidikan non-formal di TK Al-irsyad Darussalam, Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat lulus di tahun 2004. Melanjutkan ke SDN 01 Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 01 Way Tenong lulus pada tahun 2013. Melanjutkan ke SMAN 01 Way Tenong lulus pada tahun 2016. Kemudian pada tahun 2016 meneruskan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas syari'ah dan Hukum. Penulis mengikuti program kuliah kerja nyata (KKN) pada tahun 2019 di desa Purwodadi Mekar Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

Bandar Lampung, 6 Juli 2020  
Yang Membuat,

Erviana

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahil'alam*, segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta sementara ini dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan Iman, Islam, dan serta nikmat kesehatan yang tidak terhitung jumlahnya. Shalawat beriring salam yang tidak terkira selalu tercurahkan kepada *habibana, wasyafi'ina waqurrata a'yunina wamaulana* Muhammad Saw, yang telah memberikan dan menuntun kita kejalan yang lurus, jalan yang penuh dengan keridhoan Allah Swt, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG NISBAH ANAK DI LUAR NIKAH YANG TIDAK PADA IBU KANDUNGNYA (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”.

Penulisan Skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuannya dari berbagai pihak yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., Rektor UIN Raden Intan Lampung;
2. Dr. H. Khairuddin, M.H., Dekan Fakultas Syari'ah serta para wakil Dekan dilingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
3. Rohmat S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan dan Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah) UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A., pembimbing I, dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si., pembimbing II, yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan;

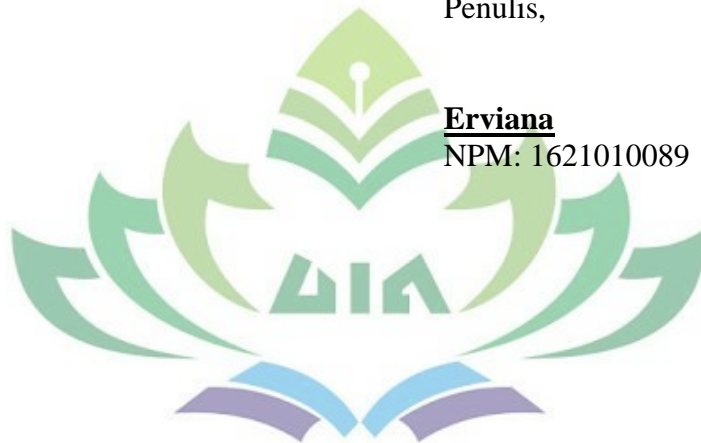


5. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing dan membantu penulisan selama mengikuti perkuliahan;
6. Kepada Muhammad Syahrizal Fauzan Ramadhan terima kasih atas doa, perhatian, kesabaran, motivasi, semangat dan juga inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini, semoga engkau selalu dilindungi Allah Swt dimanapun berada dan semoga engkau pilihan terbaik yang Allah pilih untukku dan masa depanku.
7. Kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani ku (Nia Ayu Irma Rosa, Nurul Khotimah, Weli Nivita, M. Abdurahman Khilabi, M. Iqbal Arifin, Ade Wijaya, Ricard, Ahmad Rian Solehudin)
8. Kepada teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas B dan juga teman kos ku yang selama kurang lebih 4 Tahun bersama yang sudah seperti saudara ku (Oktari Rahayu, Zulfa Fidiyah, Adelia Rahmawati, Mita Maulani, Fadhilah Zikriyyah, Rizma Yulizar, Nuning Insiyah, Imroatul Kh, Miftahul Fariha serta teman-teman lainnya).
9. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, dan juga Perpustakaan Pusat Universitas yang telah memberikan informasi, data, refrensi, dan lain-lain;
10. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syari'ah angkatan 2016 serta adik-adik hukum keluarga khususnya;
11. Untuk semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini dan teman-teman yang baik yang ku kenal semasa hidupku;

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi upaya menyempurnakan tulisan ini kedepannya. Akhirnya diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 06 Juli 2020  
Penulis,

**Erviana**  
NPM: 1621010089





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian.....	11
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	12
G. Signifikasi Penelitian .....	12
H. Metode Penelitian .....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Pernikahan Dalam Syari'at Islam .....	17
1. Pengertian Pernikahan.....	17
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	19
3. Tujuan Pernikahan .....	23
4. Hikmah Pernikahan.....	25
B. Anak Luar Nikah Dalam Hukum Islam .....	27
1. Pengertian Anak Di Luar Nikah.....	27
2. Kedudukan Anak Di Luar Nikah .....	29
3. Hak Anak Di Luar Nikah .....	33
C. Nasab Dalam Hukum Islam .....	36
1. Pengertian Nasab.....	36
2. Pemeliharaan Nasab Dalam Hukum Islam .....	38
3. Hubungan Nasab Dalam Hukum Islam.....	41
4. Sebab-Sebab Ketetapan Nasab.....	45
5. Cara Penetapan Nasab.....	49
D. Tinjauan Pustaka.....	51
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Singkat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	55
B. Deskripsi Data Penelitian Tentang Nisbah dan Anak Luar	

Nikah.....	61
C. Faktor-Faktor Terjadinya Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya .....	64
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
A. Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu Kandung- Nya Di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat .....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak DiLuar Nikah Yang tidak pada Ibu Kandungnya .....	79
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Rekomendasi .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1	Berita Acara Seminar Proposal
Lampiran 2	SK Pembimbing
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Kartu Konsultasi Skripsi
Lampiran 6	Surat Keterangan Lulus Turnitin



## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Data Pemerintah Kelurahan Pajar Bulan.....	56
2. Jumlah Penduduk Kelurahan Pajar Bulan.....	58
3. Mata Pencarian Penduduk Kelurahan Pajar Bulan.....	60
4. Agama Penduduk Kelurahan Pajar Bulan.....	60
5. Tingkatan Pendidikan Penduduk Pajar Bulan.....	61
6. Data Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Yang Melakukan Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu Kandungnya.....	66
7. Data Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Yang Melakukan Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu Kandungnya.....	67
8. Data Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Yang Melakukan Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu Kandungnya.....	68
9. Data Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Yang Melakukan Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu Kandungnya.....	69
10. Data Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Yang Melakukan Nisbah Anak Di Luar Yang Tidak Pada Ibu Kandungnya.....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk mempermudah pemahaman tentang judul skripsi ini agar tidak menimbulkan kekeliruan dan kesalahpahaman, maka penulis akan menguraikan secara singkat istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu kandungnya (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat)”, sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang berpijak kepada *kitabullah* dan *kitabulhadits* sebagai sumber utama, ijtihad pijakan kedua sebagai sumber pelengkap atau penyempurna utama.<sup>2</sup> Maksud dari kedua definisi tersebut ialah Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan yang berpijak pada syari’at Islam.
3. Nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya, kata nisbah yang memiliki arti menghubungkan, menyandarkan keturunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia yaitu perhubungan keluarga atau nama yang menyatakan seketurunan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke-4*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup>Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Penerbit University Lampung, 2008). h. 7.

<sup>3</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia....*, h. 964.

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah dan hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>4</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya adalah menyandarkan hubungan nasab anak di luar nikah yang tidak kepada ibu kandungnya melainkan kepada orang lain.

Berdasarkan dari penjelasan diatas judul Skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya dan penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

## **B. Alasan memilih judul**

### **1. Secara Objektif**

Alasan objektif dari penelitian ini terdapat beberapa masyarakat yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat. Dengan demikian adanya kenyataan seperti ini membuat penulis ingin mencari tau faktor-faktor yang menjadi sebab terjadinya dan mengkaji mengenai permasalahan ini.

### **2. Secara Subjektif**

- a. Judul yang diajukan belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak Di Luar Nikah yang tidak Pada Ibu kandungnya.

---

<sup>4</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h. 135



- b. Pokok bahasan ini sangat sesuai dengan jurusan yang penulis ambil di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

### C. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti membutuhkan kebahagiaan, salah satunya adalah memiliki pasangan hidup. Dimana akan menjadikan pasangannya sebagai salah satu pelengkap hidupnya, sebagai bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt bahwa dalam rangka menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan haruslah didasarkan pada ikatan yang telah ditentukan-Nya yaitu melalui lembaga perkawinan lembaga yang suci sakral bagi umat Islam.

Nikah adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.<sup>5</sup>

Pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan antara jenis laki-laki dan juga perempuan. Hal ini dikarenakan, pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia atau keturunan dan hubungan antara sesama.

Ulama fiqh mengatakan bahwa nasab adalah fondasi yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bisa mengikat pribadi berdasarkan kesatuan darah.<sup>6</sup> Karena itulah dalam rangka memelihara keberlangsungan manusia atau keturunan untuk menjaga nasab inilah agama Islam melarang segala bentuk perzinahan dan prostitusi serta sangat

<sup>5</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar lampung: CV.TeamMsBarokah, 2015), h. 1.

<sup>6</sup>M.Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam Edisi Ke-2*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 7.

menganjurkan nikah untuk melangsungkan keturunan umat Islam agar tidak punah dan mempunyai hubungan kekerabatan yang sah dan jelas.<sup>7</sup>

Bersamaan dengan adanya perintah nikah Islam juga mengharamkan umatnya melakukan perbuatan zina, karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah. Nasab berasal dari bahasa arab yaitu *nasaba* yang berarti hubungan atau keturunan, yang merupakan sebuah karunia serta nikmat yang diturunkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya.<sup>8</sup> Firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *musaharah* (hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan) dan Tuhanmu Mahakuasa”. (QS. Al-Furqan 25:54)<sup>9</sup>

Jelas bahwa agama Islam begitu intens mengatur hubungan keturunan atau nasab, yang sejalan dalam syari’at yang menganjurkan umatnya untuk menikah, karena perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, membentuk keluarga, mencegah perzinahan, dan memelihara serta meneruskan keberlangsungan manusia dan keturunannya di dunia.

Dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antara anggota keluarga. Allah Swt menjadikan nasab sebagai sarana utamanya, nasab juga merupakan hak yang paling pertama yang harus diterima oleh seorang anak bayi agar terhindar dari kehinaan dan ketelantaran, sebagaimana adanya

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana,2003), h. 24.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: cv Penerbit J-Art), h. 364.

kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya.<sup>10</sup>

Sejatinya anak begitu berharga yang sudah diamanahkan, dititipkan oleh Allah Swt kepada setiap pasangan yang sudah menikah dan menjadi orangtua baik menjadi seorang bapak atau seorang ibu. Yang memiliki peran masing-masing bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, seperti mengajarkan hal-hal yang baik, mendidik, memberikan perlindungan, dijaga dan dirawat dengan baik dari kecil sampai dewasa.

Bagaimana pun kelak seorang anak akan menjadi penyambung kehidupan orangtuanya walaupun, diantara salah satu atau keduanya telah meninggal tetap akan memiliki hubungan yang sah sebagai seorang anak yang menjadi buah cinta dan kasih dari ayah dan ibunya. Hanya saja mengenai anak luar nikah atau anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, dimana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.<sup>11</sup>

Bunyi Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>12</sup> Kemudian di perjelas dengan pendapat para ulama yang sepakat bahwa anak yang lahir di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya.

---

<sup>10</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Islam Edisi ke-2*, h. 12.

<sup>11</sup>Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.151.

<sup>12</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 178.



Anak luar nikah yang dihasilkan dari perbuatan zina, zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dan apabila setelah terjadinya perbuatan keji itu dan mengakibatkan lahirnya anak, maka anak tersebut lahir dalam keadaan suci dan tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina itu.<sup>13</sup>

Masalah anak di luar nikah yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan, adalah seorang anak yang lahir tanpa adanya ikatan pernikahan yang dilakukan oleh ibu si bayi dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Jadi tidak terjadi pernikahan antara keduanya pada saat anak tersebut belum lahir maupun sesudah lahir, sehingga anak tersebut lahir dalam kondisi di luar nikah. Masyarakat memiliki pandangan tersendiri mengenai anak di luar nikah yang terjadi karena hubungan perzinaan itu sebagai anak zina, anak laknat, anak haram.

Perbuatan zina akan menimbulkan dampak yang besar yaitu mengacaukan nasab seseorang bahkan selamanya anak zina tidak pernah mempunyai ayah kandung secara sah. Para ulama juga telah sepakat bahwa perzinaan bukan penyebab timbulnya hubungan nasab anak dengan ayah, sehingga anak tersebut tidak boleh dihubungkan dengan nasab ayahnya.

Nasab merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan merupakan tindak pidana (*Jarimah*) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat.<sup>14</sup> Sesuai dengan cara penetapan nasab antara anak dan ayah berdasarkan dari pernikahan sah, *fasid*, dan hubungan senggama *syubhat* dan

---

<sup>13</sup>M.Nurul Irfan, *Status & Nasab Anak Dalam Islam Edisi Ke-2*, h. 88.

<sup>14</sup>*Ibid.*

hubungan antara anak dan ibu kandungnya berdasarkan dari kehamilan dan kelahirannya.

Berkaitan dengan hal diatas maka jelas bahwasanya anak luar nikah yang lahir tanpa ikatan pernikahan atau disamakan dengan anak zina hanya akan bernasab dengan perempuan yang pernah mengandung dan melahirkannya, dan juga keluarga ibunya.

Masalah yang terjadi di Kelurahan Pajar bulan disebabkan karena terdapat sekelompok orang yang mengalami kehamilan sebelum menikah, yang berimbas kepada anak yang ada dikandungannya. Karena ibunya tidak mendapat pertanggung jawaban, dan pada saat anak itu lahir menimbulkan dampak yang signifikan terhadap anak di luar nikah tersebut.

Selain itu tidak jarang anak di luar nikah mendapatkan perlakuan yang kurang baik, seperti tidak mendapat pengakuan dari laki-laki yang menyebabkan kehamilan serta kelahirannya bahkan tidak mau mengakui anak yang lahir tersebut sebagai anaknya dan dikucilkan oleh masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah itu.

Dalam Hukum Perdata untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengan anak di luar nikah, dapat dilakukan dengan cara peningkatan status anak di luar nikah melalui pengakuan dan juga pengesahan anak.<sup>15</sup>

Sesuai dengan bunyi perubahan pasal 43 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan “Anak yang dilahirkan di luar

---

<sup>15</sup>Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 151.

perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya” hal ini bisa saja dilakukan apabila semua indikator telah terpenuhi dari segi pengakuan dan juga pengesahan seperti ada bukti sempat terjadi pernikahan siri atau nikah di bawah tangan dengan begitu masyarakat bisa mengubah status anak di luar nikah menjadi memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya dan statusnya menjadi anak yang sah.

Hanya saja yang terjadi di kelurahan tersebut, perempuan yang hamil di luar nikah tidak karena tidak mendapatkan pertanggung jawaban juga tidak melangsungkan pernikahan sama sekali dengan si laki-laki yang menyebabkan kehamilan maka akan sulit untuk melakukan pengakuan dan pengesahan anak. Sehingga membuat pihak keluarga anak di luar nikah berinisiatif melakukan nisbah anak di luar nikah dengan menghubungkan ke orang lain sebagai ibu kandungnya.

Cara ini dilakukan karena dianggap lebih mudah, ketimbang melakukan pengesahan karena banyak menimbulkan polemik yang memicu permasalahan dan pertentangan yang terjadi pada masing-masing keluarga. Dan ditakutkan masalah-masalah yang timbul itu nantinya memicu penelantaran anak di luar nikah tersebut, sehingga masyarakat berinisiatif melakukan nisbah dengan berbagai faktor alasan ada dimasing-masing pihak yang sudah menjadi pertimbangannya untuk melakukan nisbah.



Kelurahan Pajar Bulan terdapat Lima orang masyarakat yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yang sengaja melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya. Jadi dalam praktiknya anak di luar nikah, dinisbahkan setelah adanya kesepakatan antara pihak yang hendak menisbahkan dengan orang yang mau dinisbahkan, setelah itu akan mengurus surat keterangan lahir dari kelurahan atau rumah sakit selanjutnya langsung anak di luar nikah yang sudah dinisbahkan tadi akan dibuatkan akta kelahiran. Nah disinilah yang berimbas memutuskan hubungan nasab anak di luar nikah tersebut dengan ibu kandungnya.

Menurut bapak Sunardi selaku orang yang menisbahkan nasab anak di luar nikah yang bukan pada ibu kandungnya, melainkan kepada anak pertamanya. bermaksud untuk menutup aib anaknya serta memberikan kemudahan pelayanan untuk anak diluar nikah dalam pelayanan kependudukan yang bersifat administratif. Karena ibu kandungnya tidak mau merawat anaknya, karena tidak mendapat pertanggung jawaban dari laki-laki yang menghamili, sempat dinikahkan dengan orang lain tetapi lelaki tersebut juga pergi meninggalkan anaknya sebelum anak tersebut lahir.<sup>16</sup>

Jadi putri kedua dari bapak Sunardi mengalami kehamilan di luar nikah, karena tidak mendapat pertanggung jawaban dari orang yang menghamili anaknya. Kemudian setelah bayi hasil zina itu lahir pihaknya sudah berupaya meminta pertanggung jawaban, tetapi tidak membuahkan hasil dan akhirnya dinikahkan dengan lelaki lain. Supaya ketika anak itu lahir, bisa memiliki

---

<sup>16</sup>*Wawancara*, Dengan Sunardi, selaku orang tua dari anak yang melakukan nisbah anak diluar nikah yang tidak pada ibu kandungnya, Lampung Barat, 20 Oktober 2019.

identitas tetapi belum sampai anak itu lahir lelaki tersebut juga pergi meninggalkan anaknya. Selanjutnya menisbahkan anak dengan mencantumkan nama anak pertamanya atau bibi dari cucunya sebagai ibu dari anak di luar nikah.<sup>17</sup>

Karena nisbah ini anak tersebut tidak memiliki hubungan keturunan atau nasab dengan ibu kandung yang melahirkannya, dalam Islam hubungan nasab anak dengan ibunya berdasarkan dari kelahirannya, baik secara syar'i atau pun tidak. Karena nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya hal tersebut menyebabkan terputus hubungan nasab antara anak dan ibu kandungnya yang sudah mengandung dan melahirkan anak tersebut.

Menurut Annisa ibu kandung dari anak di luar nikah yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya, dengan cara menyandarkan nasab anak nya kepada kakak iparnya. Cara ini dilakukan agar anak tersebut tidak mengetahui mengenai masa lalu ibunya yang pernah melakukan perbuatan yang keji, dengan menutup aib sehingga akan terjaga nama baiknya dan memiliki identitas yang jelas yang bersifat administratif kependudukan anak tersebut.<sup>18</sup>

Masyarakat beranggapan bahwa anak tersebut merupakan tanggung jawabnya dan berupaya memberikan perlakuan terbaik agar dikemudian hari tidak merasa dibedakan dengan anak-anak yang lain yang terlahir secara sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Setiap anak yang lahir sebagai anak yang

---

<sup>17</sup>Wawancara, Dengan Ardi, selaku saudara ipar Bunga dan menantu dari bapak Sunardi atau orang yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya, 30 Juni 2020.

<sup>18</sup>Wawancara, Dengan Anisa, selaku orang yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya, 03 Januari 2020.

tanpa adanya ikatan pernikahan, tentu hal-hal yang berkaitan dengan hak keperdataannya sangat tidak menguntungkan. Karena mereka hanya memiliki hak keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, setiap anak memiliki hak atas identitas diri yang melekat pada dirinya yang dicantumkan dalam Akta kelahirannya.

Dengan terjadinya nisbah anak diluar nikah yang tidak pada ibu kandungnya ini jelas bertentangan dengan syari'at, karena mengacaukan nasab melakukan perubahan nama ibu kandungnya pada aktanya sedangkan,

Islam memerintahkan manusia untuk melindungi keturunan, agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan. Memelihara keturunan (*hifdzu al-nasl*) merupakan salah satu *al-khams maqasid syari'ah*. Islam menetapkan ketentuan keturunan itu menjadi hak anak-anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya.

Memperhatikan fenomena yang terjadi di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way tenong Kabupaten Lampung Barat maka penulis tertarik untuk membahas skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak Luar Nikah yang tidak pada Ibu Kandungnya (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat).

#### **D. Fokus Penelitian / Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka penelitian ini fokus kepada masalah yang terjadi mengenai



faktor terjadinya nisbah anak luar nikah yang tidak pada ibunya kandunganya, dan bagaimana Tinjauan dari hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandunganya.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana faktor terjadinya nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandunganya?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandunganya?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada masalah yang dibahas dalam skripsi ini, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor dari terjadinya nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandunganya dikelurahan Pajar Bulan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandunganya dikelurahan Pajar Bulan.

#### **G. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis dan juga praktis dalam rangka memperluas pengetahuan mengenai menjaga kemurnian nasab dan dilarang mengingkari nasab anak pada masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Lampung Barat.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Secara Teoritis

- a. Menambah dan memperluas ilmu pengetahuan mengenai masalah nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.
- b. Dijadikan sebagai landasan teori bagi peneliti selanjutnya yang sejenis.

### 2. Secara Praktis

- a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam kelurahan Pajar bulan khususnya mengenai menghubungkan nama nasab atau nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.
- b. Menjadi bahan referensi dalam menyikapi hal-hal dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat Islam, khususnya di kelurahan Pajar Bulan.

## H. Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode adalah suatu keharusan dalam sebuah penelitian agar validasi data bisa dicapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang efektif serta efisien dan sesuai dengan tujuan penelitian, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka diperlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian yaitu sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo, 2012), h. 80

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yakni memperoleh data-data dengan menggunakan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang di susun, dijelaskan, di analisis, diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan. Jadi dalam penelitian ini Sifat-sifat yang berkaitan dengan masalah tentang faktor terjadinya nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.

## 2. Partisipan dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pajar Bulan Way Tenong Lampung Barat, yang didalamnya terdapat beberapa masyarakat yang mayoritas Islam. Penelitian ini ditujukan langsung kepada orang yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya sebagai narasumber yang memberikan jawaban serta menjelaskan suatu pertanyaan yang akan peneliti tanyakan terkait dengan masalah yang akan diteliti.

## 3. Sumber Data Penelitian

Dalam jenis ini data-data yang dijadikan acuan bersumber dari:

### a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang

kemudian diolah oleh peneliti.<sup>20</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah lima orang masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat yang melakukan nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya kepada orang lain dan beberapa masyarakat yang mendukung penelitian ini.

b. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat disajikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.<sup>21</sup> Penulis mengambil data sekunder dari data pustaka seperti Al-Qur'an, Hadist, buku-buku mengenai hukum keluarga (*Fiqh Munakahat*), kompilasi hukum Islam (KHI), dan segala keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Riset Lapangan (*field Research*), yaitu mengumpulkan data dari lapangan memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Metode Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>22</sup> Observasi ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh melalui interview, dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan terhadap data yang diperlukan. Untuk mempermudah dalam melaksanakan observasi ini mengadakan secara kekeluargaan

<sup>20</sup>Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 106.

<sup>21</sup>Sumardi Suryabrata, *Ibid.* h. 85.

<sup>22</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achami, *Metodologi Penelitian*, h. 70.



terlebih dahulu untuk menghindari kecangungan dan rasa kaku, takut dan lain sebagainya dapat mengganggu jalannya observasi.

- 2) Metode Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>23</sup>

Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dari narasumber tentang faktor nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya demi memperoleh data yang akan penulis jadikan sebagai data primer.

- 3) Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu.<sup>24</sup> Peneliti meminta data-data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait dengan menisbahkan anak diluar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber. Dalam hal ini penulis menggunakan metode induktif, yang berasal dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu digeneralisasikan menjadi umum. Sehingga didapatkan jawaban yang benar dari pembahasan skripsi ini mengenai tinjauan hukum Islam tentang nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.

---

<sup>23</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127.

<sup>24</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian.....*, h. 240.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Pernikahan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan merupakan sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-tujuan lainnya. Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya didunia ini menjadi tentram.<sup>25</sup> Dan Allah Swt dengan sengaja menumbuhkan rasa kasih dan sayang kedalam hati masing-masing setiap hambanya.

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Allah Swt yang dilengkapi rohani dan akal, yang dapat menjalankan salah satu syariat agama yaitu nikah. Nikah secara etimologi berarti *al-dhamuwa al-jam'u*.<sup>26</sup> Yaitu mengumpulkan sedangkan menurut syara' artinya akad yang sudah diucapkan dan sudah memenuhi rukun-rukun serta syarat tertentu untuk berkumpul.<sup>27</sup>

Nikah (kawin) dalam sudut pandang Islam ialah suatu perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada diri sendiri atau pada masyarakat.

Selain itu juga merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki

---

<sup>25</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Edisi 1 Cetakan ke-2* (Jakarta: Siraja, 2006), h. 2.

<sup>26</sup>A. Waros Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: pusta prograsif, 1997), h. 1461.

<sup>27</sup>Imam Taqiyyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Husain, *kifayat al-akhyar*, (Bandung: al'marif, 1984), h. 16.

dan perempuan agar diantara keduanya mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.<sup>28</sup> Sesudah terlaksananya sebuah akad.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan Pernikahan adalah sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dalam Pasal 3 Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.<sup>29</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Firman Allah SWT Q.S Al-Hujarat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>30</sup>

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan

<sup>28</sup>Dewani romli, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung: Nur Utoya Jaya, 2009), h. 10.

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Islam, h. 7.

<sup>30</sup>Depatremen Agama Ri, *Al-qur'an dan terjemahnya*, h. 81.

hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarkhi tanpa aturan.<sup>31</sup>

Untuk menyalurkan naluri manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan bertata krama, yang membawa dampak yang besar untuk kedepannya. Maka dengan adanya pernikahan, terjalalah jalur kekerabatan yang konkrit serta benar maka diadakan suatu tata aturan dan hukum dalam perkawinan Islam.

Sungguh Agung Islam dalam mengkemas aturan perkawinan yang menjadikan keharusan bagi setiap pasangan yang akan menjalankan hidup berkeluarga, bukan saja sebagai sarana untuk melangsungkan nalurnya sebagai manusia yang senantiasa menginginkan kelangsungan hidup untuk mengembangkan keturunannya. Lebih dari itu perkawinan dalam sudut pandang Islam adalah senantiasa mempertimbangkan kesucian sebagai makhluk sosial yang telah diilahi serta secara mendasar oleh Allah SWT.<sup>32</sup>

## **2. Dasar dan Hukum Perkawinan**

### **a. Dasar Hukum**

Nikah merupakan sunnaturnasul yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnaturnasul.

Allah Swt berfirman dalam Q.S Al-Rum : 21

---

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 11

<sup>32</sup> Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, h. 4



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Firman Allah Swt Q.S Ad-Dzariyat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”

Firman Allah Swt Q.S Yasin 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari pada apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (متفق عليه)

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin Mas’ud ia berkata, telah bersabda Rasulullah Saw kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa diantara kamu sekalian yang mampu menanggung beban pernikahan, maka hendaklah dia menikah, karna sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukan pandangan (bermaksiat) dan lebih dapat memelihara farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, sedangkan telah

*mengininkanya. Maka hendaklah baginya berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu mampu menundukan syahwat” (HR. Bukhari dan Muslim).*

b. Hukum Pernikahan

*Bidayatul Mujtahid* terjemahan Abdurahman dan Haris Abdullah dalam Bab An-Nikah, memaparkan golongan fuqaha, yakni jumhur, berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan Zhahiri berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki muta'akhhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain lagi.<sup>33</sup>

Menurut mereka yang ditinjau berdasarkan dari kekhawatiran terhadap kesusahan atau kesulitan dirinya, maka pertimbangan pendapat ini didasarkan dari atas kemaslahatan.

Hukum nikah termasuk perkara yang selalu dikaitkan dengan kondisi orang yang akan melakukannya, dengan begitu kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai *illat* (sebab) hukum. Para ulama merumuskan hukum nikah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Wajib, Hukum ini layak dibebankan kepada orang yang telah mampu memberi nafkah, jiwanya terpanggil untuk nikah dan jika tidak nikah khawatir terjerumus ke lembah perzinaan. Hal ini diperkuat dengan tuntunan agama bahwa menjaga diri dari

---

<sup>33</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* terjemahan M.A Abdurahman, A.Haris Abdullah (Semarang: CV. Asy Syifa, 1990), h. 351.

<sup>34</sup>Sapiudin Shiqiq, *Fiqh Kontemporer*, h. 59.

perbuatan haram adalah wajib, maka yang demikian ini adalah wajib untuk menikah.<sup>35</sup>

Adapun bagi yang hanya memiliki keinginan yang kuat tapi belum mampu memberi nafkah, maka lebih baik ia menahan diri. Sebagai salah satu cara untuk menjaga diri ketika gejolak nafsu biologisnya yang memuncak bagi orang yang belum layak nikah karena belum mampu menafkahi seperti yang disarankan agar ia memperbanyak puasa.

- 2) Sunnah, orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak nikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah sunnah.<sup>36</sup>

Pernikahan yang hukumnya sunnah berarti pernikahan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa.

- 3) Haram, hukum ini layak bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah dan jika ia memaksakan diri untuk menikah akan mengkhianati istrinya atau suaminya, baik dalam pemberian nafkah lahiriah maupun batiniah sehingga dengan pernikahan itu hak-hak istri atau suami tidak terpenuhi.<sup>37</sup> Pernikahan yang hukumnya haram berarti pernikahan itu dilarang keras untuk dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika tidak dilakukan mendapatkan pahala.

---

<sup>35</sup>Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, h. 17.

<sup>36</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 20.

<sup>37</sup>Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontemporer*, h. 60.

4) Makruh, Makruh maksudnya bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir untuk berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.<sup>38</sup>

Jadi hukum menikah makruh ini apabila pernikahan itu lebih baik ditinggalkan dari pada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan tidak berdosa.

5) Mubah, hukum mubah ini bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlatarkan isrti.<sup>39</sup> Jadi pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamnya dan membina keluarga sejahtera.

### 3. Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga untuk memebentuk dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya, mencegah perzinahan dan juga ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketenteraman keluarga dan masyarakat.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, h. 21.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), h. 26.



Dalam Islam tujuan pernikahan adalah tuntunan agama yang perlu mendapatkan perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk Agama. Ada dua tujuan seseorang melangsungkan pernikahan yaitu memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama. Manusia mempunyai kecendrungan terhadap cinta manusia, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan.

Dalam buku Eny Bilkafe, EM Yusmar menyebutkan bahwa tujuan perkawinan ialah:

- a. Melestarikan keturunan dengan hikmahnya yaitu mengharapkan ridha Allah SWT dan Rasulullah Saw dengan memperbanyak keturunan kemudian dengan begitu memperbanyak umat sebagai kebangganya. Mencari berkah doa anak yang shaleh, mencari syafaat dengan matinya anak yang masih kecil.
- b. Menjaga diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- c. Mentramkan hati dalam rumah tangga dengan ikatan kasih sayang.
- d. Membersihkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi.
- e. Melatih dan memerangi hawa nafsu dengan menjalankan hak dan kewajiban berumah tangga.<sup>41</sup>

Perkawinan mempunyai tujuan sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan yang rukun, tentram dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis mahluk ciptaan Allah.

---

<sup>41</sup>EM. Yusman, *Emy Bilkafe wanita dan nikah menurut urgensinya*, (Kediri: Pustaka Azm, 2002) h. 14.

Perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusia, untuk memenuhi tuntutan nafsu syahwatnya dengan tetap memelihara keselamatan agama dan diri yang bersangkutan, sehingga terhindar dari godaan setan yang menarik untuk berzina.<sup>42</sup>

Tujuan perkawinan sesuai dengan tuntutan agama Islam, sebagai penyaluran untuk memenuhi nalurinya dan juga melaksanakan perintah agama. Dan pada kondisinya tujuan perkawinan sesuai dengan tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bahwa bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tuhan Maha Esa.

#### 4. Hikmah Pernikahan

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi, menjadi penyalur nafsu birahi yang halal, melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari godaan setan yang menjerumuskan.

Selain itu juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling tolong menolong dalam wilayah kasih sayang dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas dalam rumah tangga.<sup>43</sup> Nikah sebagai bagian dari syariat Allah mengandung hikmah di dalamnya yang bermanfaat untuk orang yang melakukannya baik secara khusus dan untuk masyarakat pada umumnya.

---

<sup>42</sup>Romlah, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil", *Jurnal Ad-Adalah*, Vol. 8, No. 1, (Juni 2016), h. 36.

<sup>43</sup>Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 71.

Terdapat lima poin yang dikutip dari pendapat Sayyid Sabid dalam kitabnya Fiqih Sunah yang berkaitan dengan hikmah dari sebuah pernikahan.

- a. Nafsu seks termasuk tuntunan terkuat dan selalu meliputi kehidupan manusia. Ketika tidak ada jalan keluar untuk melampiaskan, maka manusia akan dirundung kegelisahan dan dikhawatirkan melakukan prostitusi (perzinaan). Maka pernikahan merupakan aturan yang paling baik dan jalan keluar yang menyejukan untuk memuaskan seks manusia. Dengan nikah jasad menjadi segar, jiwa menjadi tenang dan penglihatan akan menutupi sesuatu yang diharamkan.
- b. Pernikahan jalan terbaik untuk melahirkan anak, memperbanyak kelahiran, dan melestarikan kehidupan dengan selalu menjaga keturunan.
- c. Naluri kepatutan dan keibuan akan tumbuh dan berkembang untuk melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Semua itu tidak akan sempurna tanpa adanya tali pernikahan.
- d. Menyadari tanggung jawab atas pernikahan dan menanggung anak-anak akan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga

ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- e. Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang satunya (suami) bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya.

Dengan pembagian tugas yang adil ini masing-masing pasangan melaksanakan tugasnya ini akan diridhai oleh Allah, dihormati oleh umat manusia dan membuahkan hasil yang menguntungkan dan diberkahi.

Dalam fiqih wanita, *Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah* dalam Bab nikah mengenai hikmah nikah menyebutkan wanitamuslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak dan menciptakan suasana menyenangkan, supaya suaminya dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan duniawi maupun ukhrawi.<sup>44</sup>

## **B. Anak Luar Nikah Menurut Islam**

### **1. Pengertian Anak Di luar Nikah**

Anak merupakan amanat yang telah dititipkan oleh Allah SWT kepada ibu dan bapaknya, yang sekaligus sebagai penyambung hidup kedua orang tuanya kelak baik di dunia maupun di akhirat kelak.

---

<sup>44</sup>Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita edisi lengkap, penerjemah: M. Abdul Ghoffar*, (Jakarta: Al-Kautsar, 1998), h. 400.



Anak ada yang lahir dari perkawinan dan ada kelompok anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan serta juga ada kelompok orang yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah yang kemudian anak-anak ini dalam istilah hukum disebut sebagai anak di luar nikah.

Kamus umum bahasa Indonesia menyebutkan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita.<sup>45</sup> Sedangkan anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, dan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhnya.

Pengertian anak di luar kawin adalah hubungan seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.<sup>46</sup>

Istilah anak zina atau anak di luar pernikahan yang sah, dalam hukum perdata berbeda pengartiannya. Anak zina menurut hukum perdata merupakan anak yang telah dilahirkan dari sebab hubungan pria dan wanita diluar perkawinan yang sah, dan memang diantara keduanya tidak terikat larangan untuk kawin dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain.

Merujuk bunyi pasal 43 Undang-undang Perkawinan, anak yang dilahirkan dari hubungan di luar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2008), h. 76.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 80.

Sekarang telah berubah bunyi menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat lain menurut hukum yang memiliki hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan ibunya.

Sesuai dengan pemaparan mengenai anak di luar nikah (zina) dapat dipahami bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.

## 2. Kedudukan Anak Di luar Nikah

Anak memiliki kedudukan yang “Spesial” anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah Swt) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lil alamin*.<sup>47</sup> Karenanya hak anak harus diakui dan diyakini, serta diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

Setiap anak baik yang lahir dalam perkawinan maupun di luar perkawinan, saat dilahirkan telah mempunyai kedudukan dalam kondisi fitrah yang bersih, tanpa dosa dan noda. Karena tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan dengan membawa dosa turunan dari siapa pun, selanjutnya

---

<sup>47</sup>Siti Nurjanah, “Keberpihakan hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”. Jurnal Al-‘Adalah Vol. 14, Nomor 2, 2017, h. 397.

segala dosa itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut sekalipun anak tersebut terlahir dari hasil zina.

Islam begitu baik dalam menekankan kedudukan anak yang sangat tinggi dan dimulaikan sebagai perhiasan dunia. Namun predikat itu hanya akan dimiliki oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dan menjadi anak sah.<sup>48</sup>

Memang dalam Islam setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka akan memiliki kedudukan yang baik dan terhormat. Selanjutnya hubungan antara anak, ibu dan ayahnya menimbulkan hak dan juga kewajiban antara anak dan orangtuanya. Dan anak sah tersebut memiliki kejelasan hubungan nasab dengan bapak dan otomatis memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya dan anak itu berhak mendapatkan waris, nafkah, perwalian, serta hak keperdataan lainnya. Sebaliknya anak yang lahir diluar pernikahan yang sah, tidak dapat dihubungkan nasabnya dengan bapaknya atau laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Karena anak diluar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>49</sup>

Kompilasi Hukum Islam pasal 100 yang menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>50</sup> Hal ini dikarenakan anak yang dilahirkan di

---

<sup>48</sup>Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, (Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003), h. 63.

<sup>49</sup>Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer I*, h. 135.

<sup>50</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia), h. 34.

luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapak dan keluarga bapaknya sehingga anak tersebut tidak berhak atas waris, nafkah, perwalian dan hak keperdataan lainnya.

Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir akibat perzinaan berkedudukan sebagai orang lain dengan bapak biologisnya, sehingga anak tersebut tidak dapat saling mewarisi dan tidak dapat diperkenankan untuk duduk berduaan serta tidak dibolehkan untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuan zinanya.

Namun dalam hukum perdata, anak yang dilahirkan di luar nikah selain anak zina dan anak sumbang dapat diakui sebagai anak sah apabila anak tersebut mendapatkan sebuah pengakuan. Dengan begitu maka akan ada status baru yang didapatkan anak tersebut, dengan adanya pengakuan dari orang tua biologisnya akan muncul status dan kedudukan serta hak anak di hadapan hukum. Anak yang tadinya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah dan ibunya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.<sup>51</sup>

Mengenai status dan kedudukan anak sudah diatur dalam Bab IX kedudukan anak pasal 42, pasal 43, pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>52</sup> sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak mengatur mengenai kedudukan anak.

---

<sup>51</sup>Witanto, *Hukum Keluarga hak dan kedudukan Anak Luar kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Meteril UU Perkawinan*, cet.1, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), h. 108.

<sup>52</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan lainnya di negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 531.

Dalam pasal 42 berbunyi : “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Dalam pasal 43 berbunyi :

- a. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Kedudukan anak tersebut ayat 1 diatas selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kedudukan anak hasil zina menurut fatwa MUI muncul sebagai respons dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010 dalam hal pengajuan materi, pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Aturan yang muncul dari perubahan pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang awalnya berbunyi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, dan sekarang berubah menjadi “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya”.

Tentu hal ini berbeda dengan yang ada di dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan juga pendapat para fuqaha. Karena itu Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan



terhadapnya setelah menimbang, mengingat, memperhatikan serta bertawakal kepada Allah maka memutuskan dan menetapkan pada point kedua mengenai ketentuan hukum yaitu:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai nasab, warisan, nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang di lakukan oleh orang mengakibatkan kelahirannya.<sup>53</sup>

Sesuai dengan Fatwa diatas Majelis Ulama Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap anak hasil zina memberikan hukuman kepada pelaku pezina berupa ta'zir yaitu dengan mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut, dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.

### 3. Hak Anak Di luar Nikah

Islam memerintahkan untuk melindungi keturunan, supaya jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan, dan jangan dipalsukan. Memelihara keturunan merupakan salah satu *al-kham maqasid syari'ah*. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak akan dapat menangkis penghinaan, atau musibah terlantar, yang mungkin menimpa dirinya.<sup>54</sup>

<sup>53</sup>Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia bidang sosial dan budaya*, (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 389-390.

<sup>54</sup>Zakariya Ahmad Al Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa Chadijah Nasution*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 13.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, hak-hak anak terhadap orang tuanya terdiri dari lima macam, yaitu hak nasab (keturunan), hak radha'ah (menyusui), hak hadanah (pemeliharaan), hak walayah (wali), dan hak nafaqah.

Setelah lima point ini terpenuhi kebutuhan tersebut telah terpenuhi, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk seirang anak dan menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, sehingga secara hukum anak berhak atas hubungan hukum tersebut.<sup>55</sup>

Berkenaan dengan hak-hak anak di atas, dapat terpenuhi dengan jalan pernikahan yang sah. Mengenai Anak yang lahir di luar pernikahan hak-haknya baik berupa hak nasab (keturunan), perwalian, pemeliharaan (hadhanah), nafkah anak di luar nikah hanya dengan ibunya yang bertanggung jawab baik dari materil maupun spiritual dari ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya.

*Hadhanah* atau hak pengasuhan anak di luar nikah yang wajib mengasuhnya adalah ibu yang telah melahirkannya dan keluarga ibunya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya.

Hak Perwalian, menurut hukum Islam anak di luar nikah tetap di anggap sebagai anak tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah dan hanya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

---

<sup>55</sup>Wahbah al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 25.

Mengenai hak nafkah, pemberian nafkah diwajibkan karena adanya anak yang lahir dari hubungan mereka.<sup>56</sup> Maksud dari kata hubungan disini ialah dua orang yang telah melaksanakan akad dalam pernikahan yang sah sehingga telah diperbolehkan atau dihalalkannya hubungan diantara keduanya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>57</sup> Berkenaan dengan anak tidak sah atau dalam Islam dikenal dengan anak di luar nikah yang disamakan status dan kedudukannya dengan anak zina dan anak *li'an*. Oleh berimplikasi terhadap akibat hukum, tidak memiliki hubungan nasab dengan bapaknya, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah dan mengenai nafkah hanya ibu yang melahirkannya dan keluarga ibunya yang memberikan nafkah kebutuhan yang diperlukan anak tersebut.

Baik dari segi material dan juga spiritual karena bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut meskipun secara biologis anak tersebut tetap anaknya, tidak saling mewarisi karena tidak memiliki hubungan nasab.

Hak-hak anak di luar nikah tersebut jelas berbeda dengan hak yang didapatkan oleh anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Islam tidak bermaksud membebani anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan intim yang di lakukan di luar perkawinan, namun Islam menjaga kesucian

---

<sup>56</sup>Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2008), h. 446.

<sup>57</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 169.

nasab atau keturunan termasuk unsur yang harus di jaga dengan baik dan penuh kehati-hatian.

## C. Nasab Dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian Nasab

Kata nasab secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, asal katanya *nasaba* yang artinya hubungan atau keturunan.<sup>58</sup> Bentuk tunggal dari kata *ansab*. Selanjutnya merupakan deviasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan. Bisa diartikan penisbatan silsilah atau hubungan seseorang kepada kerabat-karibnya, seseorang ataupun sekelompok orang.

Su'di Abu Habib secara tegas menyatakan bahwa arti kata nasab sama dengan kerabat. Nasab yang telah menjadi bahasa Indonesia dan telah masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak) atau pertalian keluarga.<sup>59</sup>

Secara istilah yaitu keturunan atau kerabat yang menjadi dasar pertalian keluarga yang menghubungkan terjadinya ikatan antara dua orang atau lebih. Dalam Ensiklopedi Islam karangan Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan *an-nasab* diartikan sebagai keturunan atau kerabat.<sup>60</sup> Yaitu pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah akibat dari pernikahan yang sah.<sup>61</sup>

<sup>58</sup>Munawir Af, dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hal. 717.

<sup>59</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*...., h.952.

<sup>60</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Cet.I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1305.

<sup>61</sup>*Ibid*.

Keturunan ahli waris yang berhak menerima dan menggunakan harta warisan yang ditinggalkan berdasarkan adanya suatu ikatan pertalian darah atau nasab, yaitu anak laki-laki atau perempuan, ayah, ibu, kakek, nenek, cucu laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki atau perempuan dan sebagainya.

Allah telah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Dalam Al-qur'an kata nasab disebut sebanyak tiga kali yaitu dalam surah Al-Furqan 54, surah as-saffat 158 dan surah al-Mu'minin 101.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharahdan Tuhan mu adalah Maha kuasa”.

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya: “Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Artinya: “Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”

Tiga ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa makna kata nasab yaitu kedekatan antara satu dengan lainnya. Nasab atau keturunan artinya



pertalian atau perhubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.

Dengan disyariatkannya pernikahan untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas, artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak.<sup>62</sup>

## 2. Pemeliharaan Nasab Dalam Hukum Islam

Pendapat yang dikutip dari Yusuf Qardhawi, Islam memelihara nasab dan karena kesangkutpautan antara nasab dan anak dan orang tuanya Allah mengharamkan zina dan mewajibkan untuk kawin demi melindungi nasab sehingga air tidak tercampur. Anak bisa di kenal siapa ayahnya dan ayah pun bisa di kenal siapa anaknya.<sup>63</sup>

Menjaga nasab atau keturunan disyariatkanlah nikah sebagai cara yang di pandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurniaan nasab, Islam memandang kemurnian nasab sangat penting karena terkait dengan struktur keluarga, baik hukum perkawinan, maupun kewarisan, meliputi hak perdata dalam hukum Islam, baik menyangkut hak nasab, hak perwalian, hak memperoleh nafkah dan hak mendapatkan warisan, bahkan konsep *ke-mahram-an* atau kemuhriman.

---

<sup>62</sup>Slamet Abidin Aminuddin, Maman Abd.Djalil, *Fiqh Munakahat II*, (Bandung:CVPustaka Setia, 1999), h. 157.

<sup>63</sup>Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram Dalam Islam Penerjemah: Muammal Hamidy*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003), h. 307.

Adapun tujuan mendasar dari adanya sebuah pernikahan yaitu untuk melangsungkan hidup dan kehidupan serta keturunan umat manusia sebagai *khalifah* di bumi. Bersamaan dengan adanya perintah nikah di dalam hukum Islam, diharamkan zina karena zina menyebabkan tidak terpeliharanya nasab secara sah.<sup>64</sup>

Syariat melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri atau menisbatkan anak. Seorang ayah dilarang mengingkari keturunannya dan haram pula bagi seorang wanita menisbahkan (menghubungkan) seorang anak kepada yang bukan ayah kandungnya.

Seperti dalam hadis Rasulullah saw bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَأَنَةِ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُدْخِلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، اخْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه النسائي)

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah saw bersabda ketika ayat *li'an* turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinaan, Allah mengabaikanya, sekali-kali Allah tidak memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan aib yang menimpanya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang terdahulu dan orang-orang yang belakangan di hari kiamat. (HR. An-Nasa'i)

Kemudian telah *diriwayatkan* dari atas mimbar oleh Ali Ra. Dari suatu lembaran yang ada padanya, dari Rasulullah Saw beliau bersabda:

<sup>64</sup>M. Nurul Irfan, Nasab & Status ...,h. 7.

عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا (متفق عليه)

Dari Ibrahim al-Taimiy dari Ayahnya, ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah berkhotbah di depan kami, dan berkata: ‘Siapa mengaku ayah bukan bukan ayahnya sendiri atau membangsakan dirinya kepada keluarga lain, dia akan mendapat laknat Allah, Malaikat dan manusia semuanya; Allah tidak akan menerimanya nanti di hari kiamat taubat maupun tebusannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Selanjutnya seorang anak juga diharamkan menasabkan dirinya kepada laki-laki selain ayah kandungnya sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis:

وَأَبَا بَكْرَةَ، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُ أُذُنَايَ وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Bakrah berkata kedua telinga mendengar dan hatiku menghapal Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang menasabkan dirinya kepada lelaki lain selain ayahnya, padahal ia mengetahui bahwa lelaki itu bukan ayahnya, maka diharamkan baginya surga”. (HR. Ibnu Majah)

Penulis menelaah bahwa baik seorang ayah maupun seorang ibu di larang untuk meningkari nasab anaknya tanpa suatu alasan dan tujuan apapun.

Islam juga tidak membenarkan seorang anak menyandarkan nasabnya kepada orang lain dan di panggil bukan dengan panggilan ayahnya sendiri, Nabi menilai ini perbuatan tersebut sebagai kemungkaran yang menyebabkan laknat dari Allah dan manusia.<sup>65</sup>

<sup>65</sup>Syeikh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram...*, h. 316.

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah pasti memiliki makna, karena bagaimana seorang yang sudah dipercayakan untuk menjaga amanah terlebih apabila ia adalah seorang ibu yang mengandung, melahirkan, setelah itu berkewajiban untuk menyusui anaknya dan menjalankan hal lainnya.

Tidak bisa memutuskan hubungan nasab dengan anaknya karena keduanya telah terikat dengan hubungan darah yang saling terkait satu sama lain. Pemeliharaan nasab Islam tidak hanya melarang perzinahan, tetapi juga melarang konsep adopsi dengan segala kemutlakannya. Karena menghapuskan nasab anak dengan ayah kandungnya tertera dalam surah Al-Ahzab ayat 4-5.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Artinya: Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Meskipun begitu Islam tetap memerintahkan untuk bersikap santun terhadap siapa pun.

### 3. Hubungan Nasab Dalam Hukum Islam

Mengenai hubungan nasab dalam Islam pembahasannya berkaitan dengan sebab-sebab timbulnya nasab dan cara menetapkannya, selanjutnya

tidak bisa lepas dari masalah masa kehamilan. Baik yang berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan maupun batas maksimal masa kehamilan.

a. Batas Minimal Masa Kehamilan

Para fuqaha dari mazhab mana saja, bahkan dari golongan Syi'ah telah sepakat bahwa batas minimal masa kehamilan adalah selama enam bulan.

Batas minimal kehamilan ini didasarkan atas dasar penggalan firman Allah dalam surah al-Ahqaf (46) ayat 15 :

وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.

Adapun dalam surah Luqman (31) ayat 14 Allah berfirman :

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

Dan menyapihnya selama dua tahun.

Atas dasar dari gabungan kedua ayat ini dapat dipahami bahwa minimal yang dibutuhkan oleh seorang ibu untuk mengandung anaknya adalah selama enam bulan.

Penjelasan yang pertama adalah, seorang ibu memerlukan waktu tiga puluh bulan untuk mengandung dan menyapih seorang anak. Sedangkan waktu yang diperlukan untuk menyapih saja dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga tiga puluh dikurangi dua puluh empat sama dengan enam, artinya enam bulan inilah batas masa kehamilan.<sup>66</sup>

<sup>66</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak....*, h. 27.



b. Batas Maksimal Masa Kehamilan

Berkaitan dengan batas maksimal masa kehamilan yang penuh dengan kontradiksi dan perbedaan pemahaman dari kalangan ahli hukum Islam. Karena tidak terdapat dalil naqli yang disepakati maka para ulama memberikan pendapatnya berdasarkan pengalaman yang sifatnya temporer dan kasusistik antara kasus satu dengan kasus lain saling bertentangan.

Berikut pendapat yang satu dengan yang lainnya bertahan dengan argumentasi masing-masing :<sup>67</sup>

- 1) Menurut Ibnu Hazm Azh-Zhahiri yang didasarkan kepada pendapat Umar bin Al-Khaththab bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah Sembilan bulan Qamariyah.
- 2) Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, salah seorang fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah satu tahun Qamariyah.
- 3) Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya, bahwa batas maksimalnya adalah dua tahun. Hal ini didasarkan dari ucapan Aisyah istri Nabi Muhammad saw, yang diriwayatkan Ad-Daruquthni : Dari Aisyah Rodiallahuanhu sesungguhnya ia berkata seorang wanita tidak akan pernah mengandung lebih dari dua tahun, (sekali pun kelebihanannya) hanya sebatas bayangan alat pemintalnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthi).

---

<sup>67</sup>*Ibid*, h. 29.

Berdasarkan ini Abu Hanifah dan para sahabatnya berkeyakinan bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah dua tahun, kalau saja hadis disepakati kehujjahannya tentunya perbedaan pendapat dalam masalah batas maksimal masa kehamilan tidak harus terjadi, sehingga batas masa kehamilan sama dengan batas minimal masa kehamilannya dalam hal kesepakatannya.

- 4) Menurut pendapat Al-Laits seorang ahli mesir pada abad kedua Hijriah bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah tiga tahun.
- 5) Menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah empat tahun. Dalam hal ini sebagian ahli fiqh golongan Hanafiah bahkan mengatakan bahwa Imam Malik Ahmad juga berpendapat serupa, Alasan tersebut merujuk pendapat bahwa para wanita Bani 'Ajlani biasa mengalami masa kehamilan empat tahun.
- 6) Menurut pendapat yang paling masyhur dari ulama dari ulama golongan Maliki, Al-Laits, Ibnu Sa'ad, dan Abad bin Al-Awwam bahwa batas maksimal masa kehamilan adalah lima tahun.
- 7) Menurut pendapat sebagian ulama mazhab Maliki bahwa batas masa kehamilan adalah tujuh tahun.

Pendapat para ahli hukum Islam di atas, diketahui bahwa masalah batas maksimal masa kehamilan ini tidak satu pun yang didasarkan atas dalil, baik dalil Al-qur'an maupun hadis.

#### 4. Sebab-sebab Ketetapan Nasab

Para ulama sepakat mengatakan bahwa nasab seseorang anak kepada ibunya terjadi dengan sebab kehamilan sebagai akibat hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah yang sah maupun melalui hubungan gelap, semen leven, perselingkuhan, dan perzinaan.<sup>68</sup>

Jadi dapat dipahami nasab seorang anak terhadap ibunya ditentukan dari kelahiran, baik secara syara' maupun hukum perundang-undangan di Indonesia.

Sedangkan nasab anak terhadap ayah kandungnya penisbatan anak terhadap ayahnya disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

##### a. Pernikahan Sah

Para fuqaha sepakat bahwa anak yang terlahir dari Rahim seorang wanita dengan jalan pernikahan yang shahih atau sah, nasabnya dikembalikan kepada suami wanita tersebut.<sup>69</sup> Karena hal itu pernikahan yang sah merupakan sebab ketetapan nasab seorang anak. Dalam menetapkan nasab melalui hubungan perkawinan yang sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Suami tersebut adalah seseorang yang memungkinkan dapat memberikan keturunan, menurut kesepakatan ulama fiqh seorang laki-laki yang telah baligh. Karena itu nasab anak tidak mungkin dihubungkan kepada lelaki yang tidak mampu melakukan

---

<sup>68</sup>*Ibid*, h. 61.

<sup>69</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, h. 32.

hubungan badan atau dengan lelaki yang tidak mempunyai kelamin, kecuali itu bisa diobati.

- 2) Menurut ulama dari kalangan mazhab hanafi, anak tersebut lahir enam bulan perkawinan. Jumhur ulama menambahkannya dengan syarat suami isteri telah melakukan hubungan badan.

Bila kelahiran anak itu kurang dari enam bulan, maka kesepakatan ulama fiqh anak yang lahir itu tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Karena hal ini menegaskan bahwa kehamilan terjadi sebelum akad nikah, kecuali jika suami itu mau mengakuinya.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, anak tersebut dapat dinasabkan kepada suaminya demi kemaslahatan kehidupan anak tersebut. Namun nasab tidak dapat dibentuk melalui perzinaan, demikian juga hak kepedataan Islam lain yang meliputi perwalian, hak kewarisan, dan hak mendapatkan nafkah juga tidak bisa ditetapkan melalui perzinaan.

- 3) Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad mengatakan bahwa syarat-syarat ketetapan nasab dalam pernikahan yang sah yaitu adanya kemungkinan bertemu antara suami dan istri setelah akad.

Apabila seorang laki-laki menikah dengan perempuan kemudian dilahirkan seseorang anak dalam waktu enam bulan atau lebih dari setelah pernikahan maka suami itu boleh mendeskripsikan kehamilan akan tetapi apabila antara suami istri

tidak pernah ketemu atau tidak mungkin ketemu, maka menurut pendapat mereka nasab tidak dapat ditetapkan.

b. Pernikahan Fasid

Pernikahan fasid adalah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan atau cacat syarat sahnya.<sup>70</sup> Penetapan atau penisbatan nasab anak dalam pernikahan yang rusak (*fasid*) sama seperti pernikahan yang sah. Penentuan nasab anak dalam pernikahan fasid disyaratkan tiga hal :<sup>71</sup>

- 1) Suami termasuk dalam orang yang mampu menghamili, yaitu dengan usia yang baligh menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah. Atau *murahiq* menurut Hanafiyyah dan Hanabilah.
- 2) Sudah jelas melakukan hubungan suami istri menurut pendapat Malikiyyah. Jika terjadi *dukhul* atau *khalwat* setelah nikah fasid maka nasab anak tidak diikutkan suami.

Hukum *khalwat* dalam nikah fasid sama dengan hukum *khalwat* dalam nikah shahih, karena sama-sama memungkinkan terjadinya senggama antara keduanya. Tetapi ulama Hanafiyyah hanya mensyaratkan *dukhul*, sedangkan *khalwat* menurut mereka tidak cukup menentukan nasab anak dalam nikah fasid karena keadaan itu tidak halal melakukan senggama.

---

<sup>70</sup> M. Nurul Irfan, *Status & Nasab Anak...*, h. 67.

<sup>71</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 36.



3) Jika pihak wanita melahirkan setelah enam bulan atau lebih dari hari *dukhul* atau *khalwat* menurut Malikiyyah, atau dari hari *dukhul* menurut Hanafiyyah.

Jika istri melahirkan anak sebelum lewat enam bulan dari *dukhul* dan *khalwat*, nasab anak tidak diikutkan pada pihak lelaki, karena ini menjadi bukti bahwa anak itu berasal dari benih lelaki lain. Dan jika wanita melahirkan setelah enam bulan dari hari *dukhul* atau *khalwat*, nasab anaknya diikutkan pada pihak lelaki.

c. Hubungan Badan Senggama *Syubhat*

Hubungan badan disebut juga sebagai seks, bersenggama, bergaul suami istri, atau bersetubuh yang dipadankan kedalam bahasa arab dari arti kata *al-wath'i*. Sedangkan kata *syubhat* berarti kemiripan, keserupaan, kesamaran, persamaan, dan ketidakjelasan.<sup>72</sup>

Jadi hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karna perkawinan yang sah dan juga bukan karena perzinaan. Senggama bisa terjadi akibat dari kesalahpahaman atau kesalahan informasi atau kesalahan perkiraan, seperti seorang pria yang menikah dengan seorang wanita yang belum pernah dikenalnya.

Lalu pada malam pertama, di kamar pengantinya, ia mendapati seorang wanita yang diyakini sebagai istrinya. kemudian, terjadilah persenggamaan atau persetubuhan, yang menyebabkan kehamilan.

---

<sup>72</sup>*Ibid*, M. Nurul Irfan, h. 74.

Setelah itu, diketahui bahwa wanita yang disetubuhinya adalah bukan istrinya yang sebenarnya.<sup>73</sup>

## 5. Cara Penetapan nasab

Sesungguhnya salah satu buah dari pernikahan yang sah adalah kepastian nasab seorang anak kepada ayahnya, sehingga anak tidak menjadi samar dan terlantar.<sup>74</sup> Penetapan nasab itu merupakan hak Allah, hak anak dan orang tuanya.

Penetapan nasab ini untuk menghindarkan anak dari ketelantaran dan kesia-siaan, disamping itu juga penetapan nasab dapat menimbulkan tanggung jawab dari masyarakat untuk turut serta menjaga anak dari keburukan dan kejahatan.

Ini juga berimplikasi terhadap pemerolehan hak anak dari orang tuanya yang berupa nafkah, perwalian, waris, hak-hak anak lainnya yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Demikian pula syariat melindungi masyarakat dari tersebarnya keburukan, menangkal berbagai sarana yang dapat memutuskan tali kekeluargaan, kezaliman keturunan dan percampuran nasab.<sup>75</sup>

Nasab seorang anak kepada ibunya dapat ditetapkan melalui kelahiran, baik kelahiran itu terjadi dalam perkawinan maupun diluar perkawinan. Adapun mengenai nasab anak kepada ayahnya bisa ditetapkan dengan tiga

<sup>73</sup>Yuni Harlina, Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinaju dari Hukum Islam), *Jurnal Islam*, Vol. 14 No. 1(Juni 2014), h. 74.

<sup>74</sup>Ahmad, Asy-Syarbashi, *Yas'alunaka: Tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan*, Penerjemah: Ahmad Subandi, ( Jakarta: Lentera, 1999),h. 209 .

<sup>75</sup>Adnan Hasan Shalih Bahrts, *Tanggung jawab Ayah terhadap anak laki-laki*, (Jakarta: Gemani Insani Press, 1996), h. 45.

cara, yaitu melalui perkawinan yang sah, perkawinan yang *fasid*, dan hubungan badan senggama atau secara *syubhat*.

- a. Pernikahan yang sah atau rusak (*al-zawaj al-shahih aw al-fasid*).

Pernikahan yang sah atau rusak merupakan sebab ditetapkan nasab, dan cara menetapkan nasabnya yaitu secara realistis, kapanpun pernikahan ditetapkan walaupun pernikahan fasid atau pernikahan menurut kebiasaanya seperti orang yang melaksanakan akad pernikahan dengan cara akad secara khusus yaitu tanpa melalui pihak pencatat nikah. maka setiap anak yang dilahirkan oleh setiap wanita dapat ditetapkan nasabnya.

- b. Pengakuan nasab atau pengakuan anak. *Ikrar bi al-nasab* merupakan salah satu cara penetapan nasab. *Ikrar bi al-nasab* ada dua macam yaitu, pengakuan nasab untuk diri sendiri dan pengakuan yang mencangkup orang lain.

- c. Pembuktian, penetapan nasab melalui bukti lebih kuat dari pada penetapan nasab yang sudah ditetapkan melalui *ikrar* dapat menjadi batal apabila ditetapkan melalui adanya bukti.

Alat bukti dalam hal menentukan nasab adalah berupa kesaksian, dimana status kesaksian ini lebih kuat dari pada sekedar pengakuan sebab kesaksian sebagai alat bukti yang melibatkan orang lain sebagai penguat. Sedangkan dalam pengakuan belum tentu didukung oleh orang lain, yang akibatnya pengakuan itu tidak kuat dan masih

mungkin untuk bisa di batalkan oleh adanya alat bukti berupa saksi yang benar.

- d. Menentukan nasab di zaman modern ini dapat diselesaikan dengan tes laboratorium tentang kesesuai darah anak dengan ayah, sehingga bisa dipastikan bahwa benar anak si A dan sebagainya. Bisa juga melakukan tes DNA, dengan demikian tes darah dan tes DNA bisa dianggap sebagai alat bukti penentuan nasab seseorang apalagi dalam penyangkalan ayah terhadap anak kandungnya. Kesesuaian antara darah anak dan darah ayah, tetapi proses pembuahannya bukan atas dasar pernikahan yang sah, maka nasab anak tersebut tidak bisa ditetapkan dan dianggap sah.<sup>76</sup>

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang penulis teliti dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nisbah Anak Di Luar Nikah Yang Tidak Pada Ibu Kandungnya (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat)”, yang secara khusus belum ada yang membahas bagaimana hukum Islam memandang tentang nisbah anak di luar nikah. Dalam hal ini, penulis berfokus kepada nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya guna mengentahui tinjauan hukum Islam terhadap faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan nisbah anak di luar nikah ini.

---

<sup>76</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status* ...., h. 103 .

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan penggalan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa referensi dari berbagai skripsi yang menunjang penelitian ini, dan terdapat perbedaan dengan skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun karya penelitian yang berkaitan dengan masalah nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Analisis terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya”.<sup>77</sup> Skripsi tersebut ditulis oleh Lisna Wati, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, tahun 2016. Jadi Lisna Wati berfokus terhadap kedudukan anak hasil zina tersebut dan juga bagaimana perlakuan anak hasil zina harus tetap mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak sah lainnya, anak zina berhak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, pengasuhan oleh orangtuanya, mendapatkan nafkah dari ayah biologisnya melalui *wasiat wajibah* serta mendapatkan waris melalui ibunya.

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan Lisna Wati, yakni penulis meneliti tentang perlakuan seseorang yang memutuskan hubungan nasab dan menghubungkan nasab anak di luar nikah kepada orang lain bukan

---

<sup>77</sup>Lisna Wati, “Analisis terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Lampung, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2016.



kepada ibu kandungnya, yang seharusnya anak di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

2. Skripsi karya Rini Wulandari, Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 dengan judul “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i Implikasinya Terhadap Hak-hak Anak”.<sup>78</sup> Rini Wulandari berfokus terhadap pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i yang menyatakan kalau anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah akad nikah, nasabnya sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka nasab hakiki kepada bapak biologisnya dan anak tersebut diharamkan untuk dinikahi bapak biologisnya. Dalam pendapat Syafi’i anak di luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah persetubuhan dengan suami sah, status nasabnya tidak memiliki hubungan nasab dengan bapak biologisnya. Anak di luar nikah tidak mendapatkan nafkah, bapak biologis tidak berhak menjadi wali, dalam kewarisan hanya mewarisi dari garis keturunan ibunya dan juga keluarga ibunya tetapi dalam mazhab Syafi’i terdapat pengecualian bahwa anak di luar nikah boleh menerima waris dengan syarat anak tersebut telah diakui oleh semua ahli warisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Rini Wulandari menjelaskan tentang bagaimana Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi’i terhadap

---

<sup>78</sup>Rini Wulandari, “*Status Nasab Anak Di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Lampung, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

status anak di luar nikah dan terhadap hak-hak anak dan penelitian yang penulis teliti lebih menekankan bagaimana hukum Islam memandang perbuatan seorang ibu atau keluarga dari anak di luar nikah yang menisbahkan anak di luar nikah tadi kepada orang lain karena dilahirkan tanpa adanya hubungan perkawinan baik secara sah maupun tidak.

3. Skripsi karya dari Mumaddun Khaerudin Salam Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus Tahun 2014 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam”.<sup>79</sup> Dalam skripsi ini dituliskan mengenai hak anak di luar nikah dalam hal siapa yang berhak menjadi wali nikah ketika anak yang lahir adalah anak perempuan, selain itu hak waris anak di luar nikah juga menjadi pokok bahasannya. Perbedaan dengan skripsi yang penulis lebih berfokus kepada bagaimana faktor terjadinya nisbah anak di luar nikah yang tidak pada ibu kandungnya.

---

<sup>79</sup>Mumaddun Khaerudin Salam, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang, <https://perpustakaan.umk.ac.id>, Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Slamet, Aminuddin, Maman Abd. Djaliel, *Fiqih Munakahat II*, Bandung:CV Pustaka Setia, 1999.
- Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan & Perceraian*, Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
- Al Barry Zakariya Ahmad, *Hukum Anak-anak dalam Islam, alih bahasa Chadidjah Nasution*, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Al-zuhaili Wahbah, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 10, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- A.Rahman Rintonuga, dkk, *Ensiklopedia hukum Islam*, Jakarta: Pt. Ictiar Baru Van Hoene, 2003.
- Arikunto Suharsimin, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktik*, cet. VIII, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Ayyub Hasan, *Fiqih Keluarga*, Penerjemah Abdul Ghofar, Jakarta: Pustaka AL-Kausar, 2008.
- Azzam Abdul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, nikah, dan talak*, Jakarta: Amzah, 2015.
- Baharits Adnan Hasan Shalih, *Tanggung Jawab Ayah Terhadap Anak Laki-laki*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Chuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (Eds), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cv Penerbit J-Art.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 4*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dewani romli, *Fiqh Munakahat*, Bandar Lampung: Nur Utoya Jaya, 2009.
- Ghozali Rahman Abdul, *Fiqih Munakahat*, Cet. IV, Ed. I, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hasan Ali M, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Ed. I Cet. II*, Jakarta: Siraja, 2006.

*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia.

Imam Taqiyyqddin Abu Bakar Bin Muhammad Husain, *kifayat al-akhyar*, Bandung: al'marif, 1984.

Irfan Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*. Ed. II, Cet. I, Jakarta: Amzah, 2013.

Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana 2008.

Munawwir A. Warson, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pusta Prograssif, 1997.

Munawir A, dan Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.

Nasruddin, *fiqih Munakahat*, Cet. I, Bandar Lampung: CV. Team MS Barokah, 2015.

Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Mustofa Rahman, *Anak Luar Nikah Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Penerbit Atmaja, 2003.

Qardhawi Syekh Muhammad Yusuf, *Halal & Haram Dalam Islam Penerjemah: Muammal Hamidy*, Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya, 2003.

Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid* terjemahan M.A Abdurahman, A. Haris Abdullah, Semarang: CV. Asy Syifa, 1990.

Shidiq Sapiudin, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2016.

Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2009.

Sumardi Suryabrata, *Metedologi Penelitian*, Jakarta: Grafik Grafika, Cet.III, 2011.

Suratno dan Anang Zamroni, *mendalami Ushul Fiqih*, (Surakarta: PT. Tiga Serangkai, 2013).

Tihami H.M.A dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita edisi lengkap, penerjemah: M. Abdul Ghoffar*, Jakarta: Al-Kautsar, 1998.

Wati Rahmi Ria, Amnawaty, Hukum dan Hukum Islam, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Meteril UU Perkawinan*, cet.1, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yusman EM, *Emy Bilkafe wanita dan nikah menurut urgensinya*, Kediri: Pustaka Azm, 2002.

**Jurnal :**

Romlah, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Tentang Keabsahan Akad Bagi Wanita Hamil”, Jurnal Al-‘Adalah, Vol. XIII, No. I, Juni 2016.

Siti Nurjanah, “Keberpihakan hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”. Jurnal Al-‘Adalah Vol. XIV, No. II,

Yuni Harlina, *Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran (Ditinjau dari Hukum Islam)*, Jurnal Islam, Vol. XIV No. I, Juni 2014.

**Skripsi :**

Mumaddun Khaerudin Salam, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Perwalian Dan Mewaris Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Sarjana Hukum, Semarang, <https://perpustakaan.umk.ac.id>, Tahun 2014.

Lisna Wati, “Analisis terhadap Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Lampung, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2016.

Rini Wulandari, “Status Nasab Anak Di Luar Nikah Prespektif Mazhab Hanafi dan Syafi’i dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Lampung, Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

**Wawancara :**

Sumber : Daftar Isi Potensi Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat

Hasil wawancara, Bapak Hi. Holman, Selaku Tokoh Adat, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 06 Januari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Hi. Adam Zahri, Selaku Tokoh Agama, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 06 Januari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Mawardi Salim, Selaku Tokoh Masyarakat, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 07 Januari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Hi. Yulian, Masyarakat, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 08 Januari 2020.

Hasil wawancara, Ibu Pitriani, Masyarakat yang melakukan nisbah anak diluar nikah, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 03 Januari 2020.

Hasil wawancara, Anisa, Masyarakat yang melakukan nisbah anak diluar nikah, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 03 Januari 2020.

Hasil wawancara, Bapak Sunardi, Masyarakat yang melakukan nisbah anak diluar nikah, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 04 Januari 2020.

Hasil wawancara, Ardi selaku menantu dari Bapak Sunardi dan saudara ipar dari Bunga (Ibu kandung anak di luar nikah), Tanggal 30 Juni 2020.

Hasil wawancara, Diana, Masyarakat yang melakukan nisbah anak diluar nikah, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 04 Januari 2020.

Hasil wawancara, Ibu Evi, Masyarakat yang melakukan nisbah anak diluar nikah, Kelurahan Pajar Bulan, Lampung 05 Januari 2020.

